

Last Updated : 05/12/2025 16.45.00

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp12,3 T (853,4%)
▼ -33,7% (yoy)

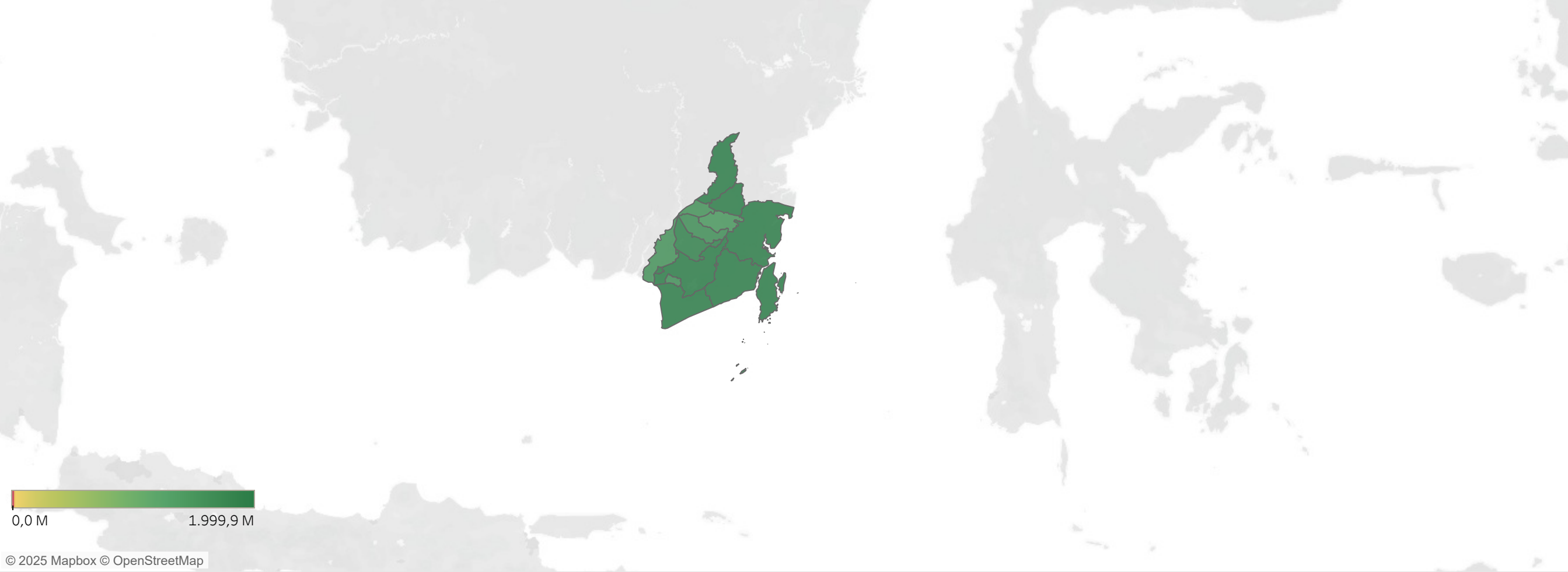
Belanja

Rp37,4 T (90,2%)
▲ 0,5% (yoy)

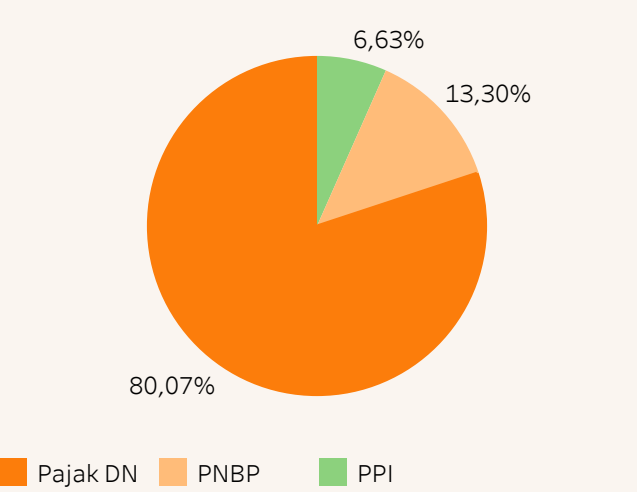
Defisit

Rp-25,0 T (62,6%)
▲ 34,6% (yoy)

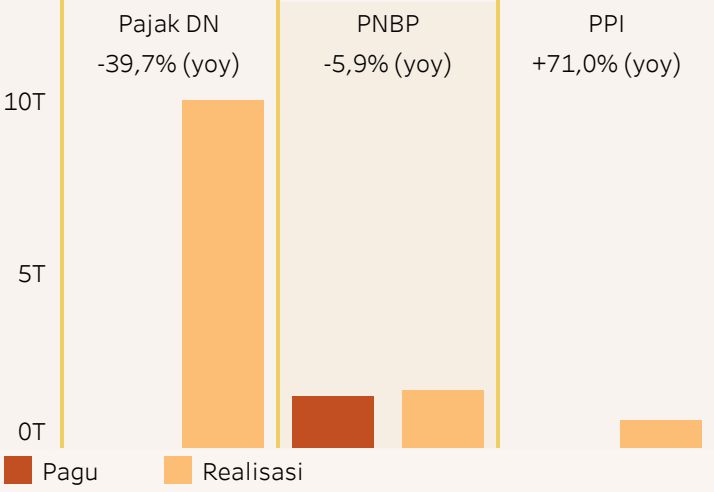
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



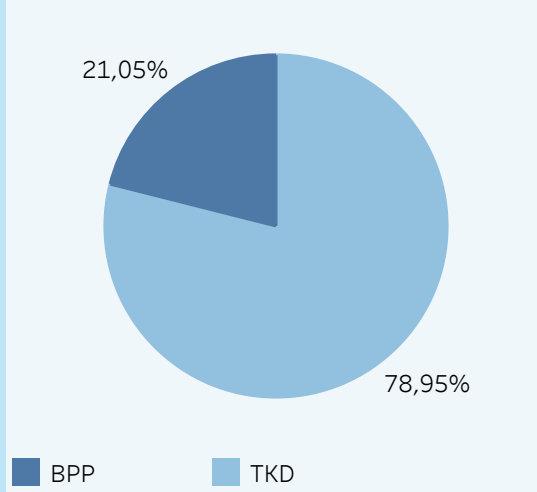
Persentase Komposisi Pendapatan



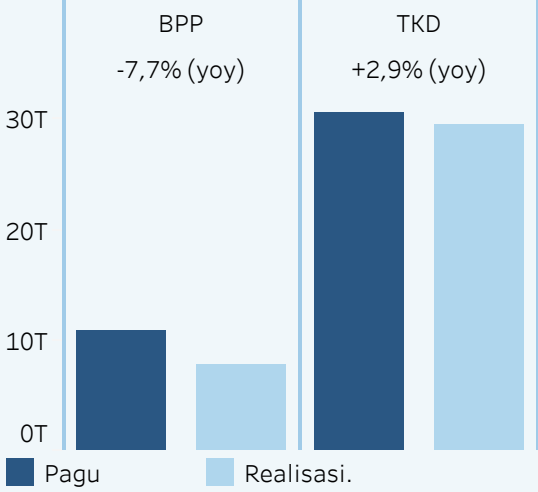
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



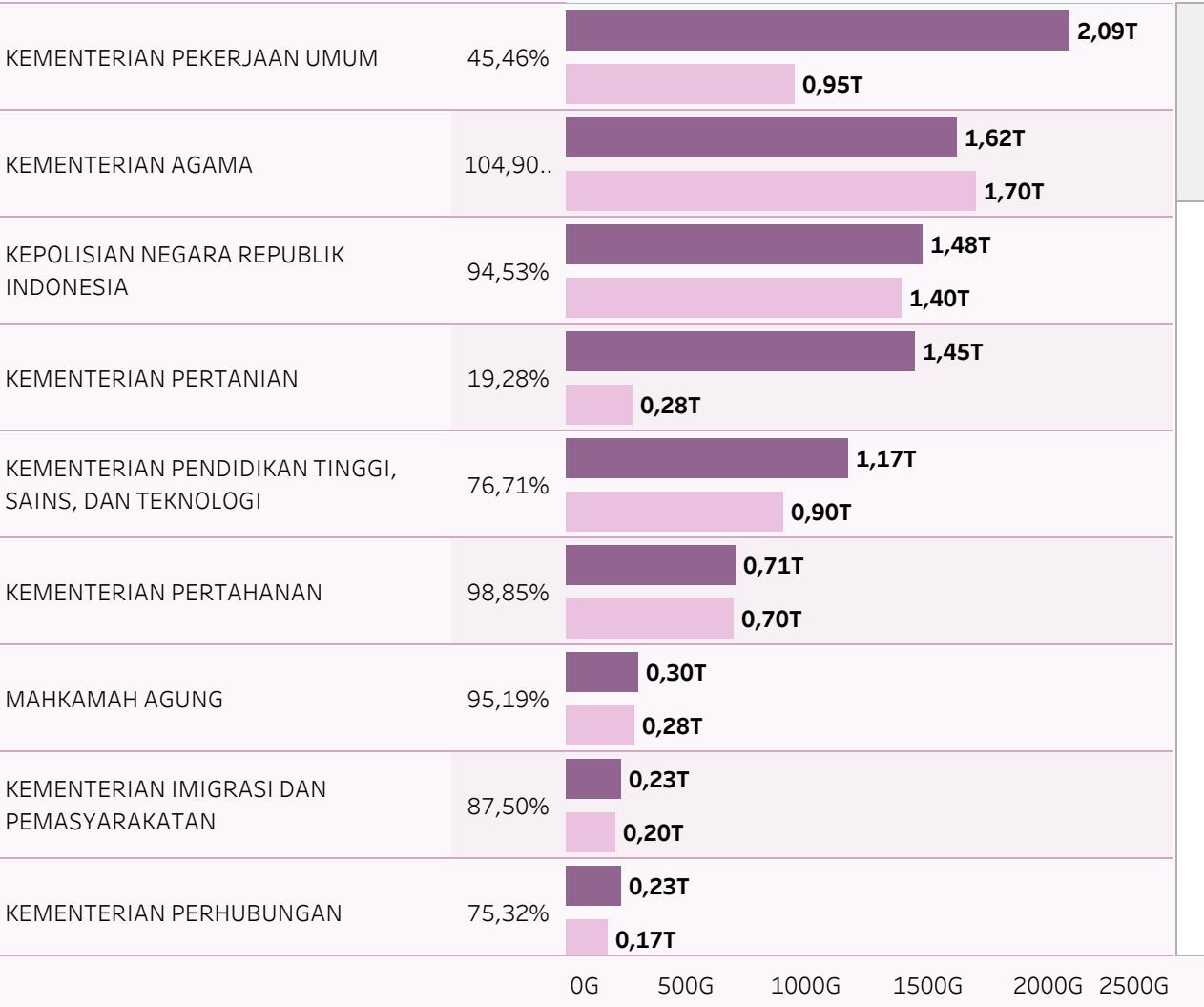
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	18,6T	12,3 T	▼ 33,65%
Grand Total	18,6T	12,3 T	▼ 33,65%

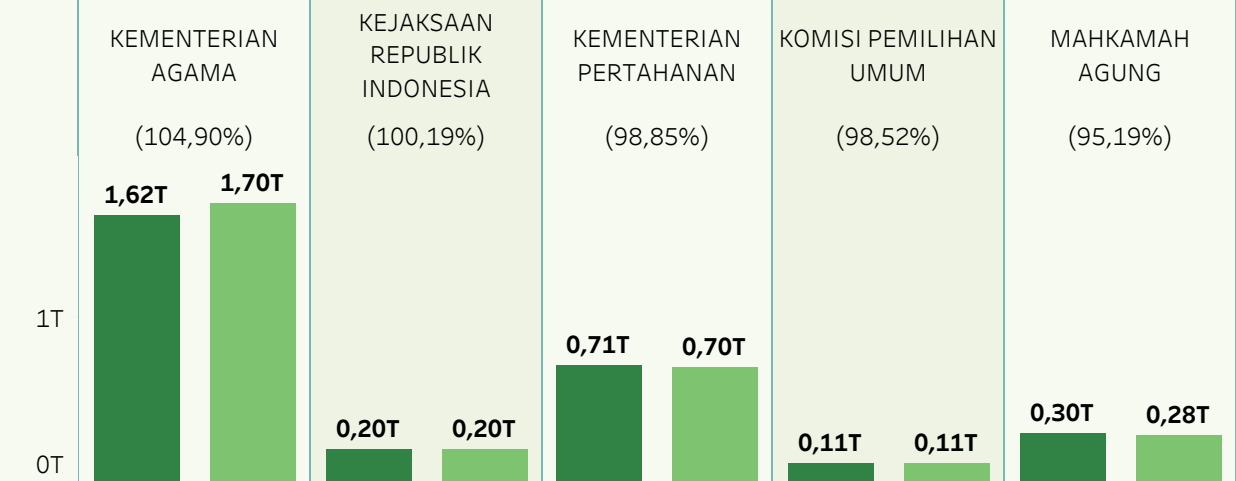
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,7T	37,2T	89,2%	41,4T	37,4 T	90,2%	▲ 0,50%
Grand Total	41,7T	37,2T	89,2%	41,4T	37,4 T	90,2%	▲ 0,50%

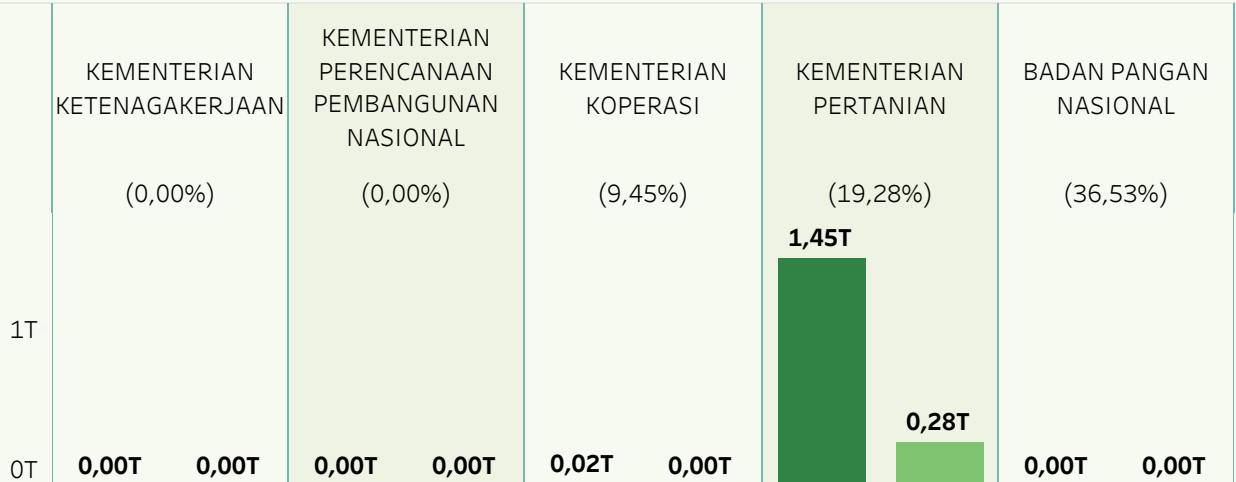
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



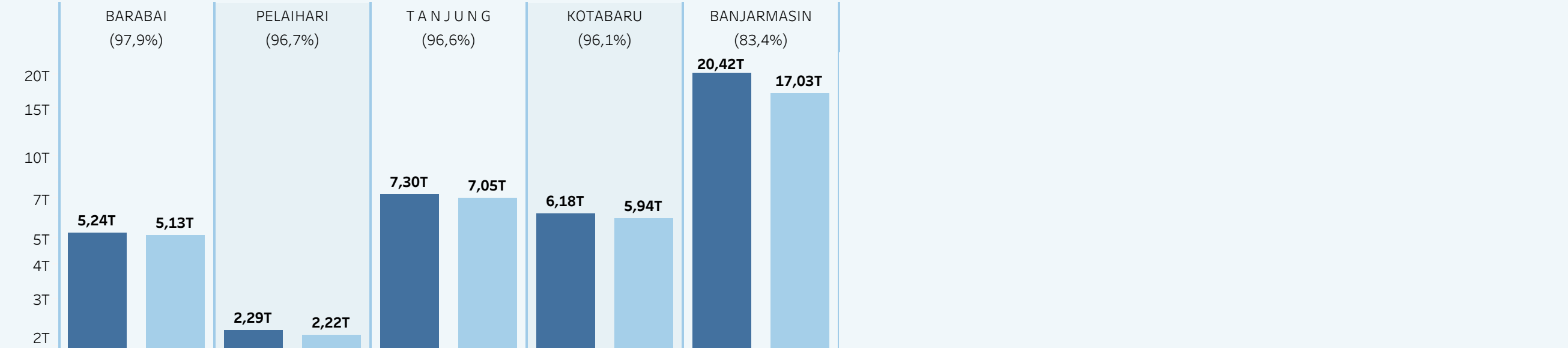
5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



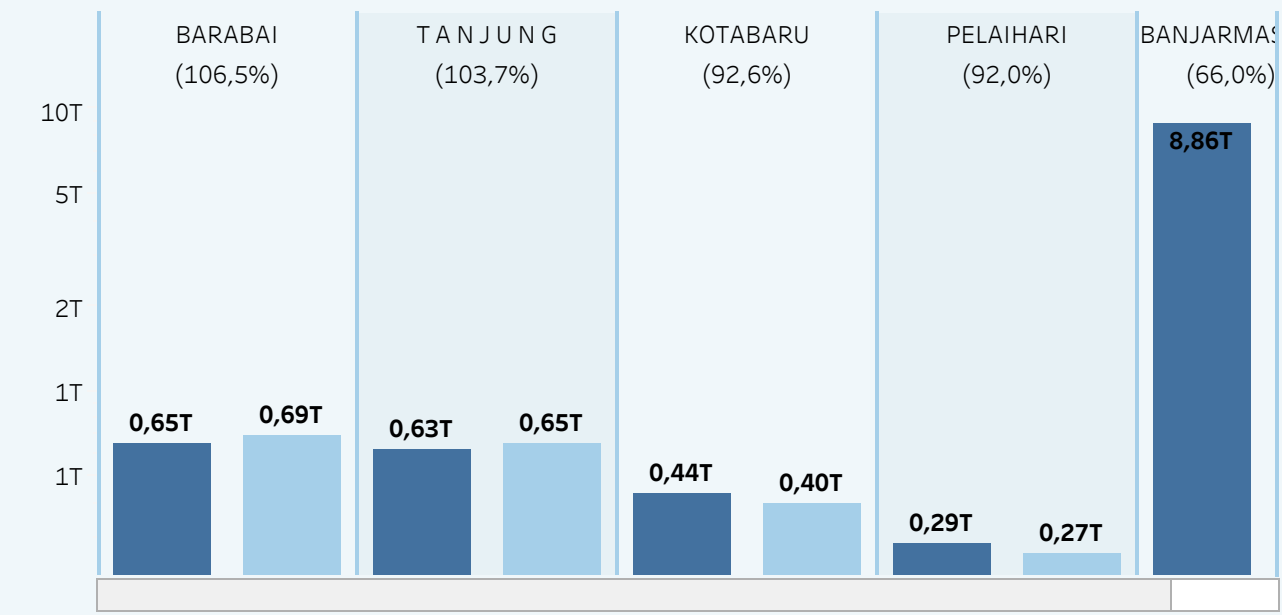
5 KL Persentase Realisasi Terendah



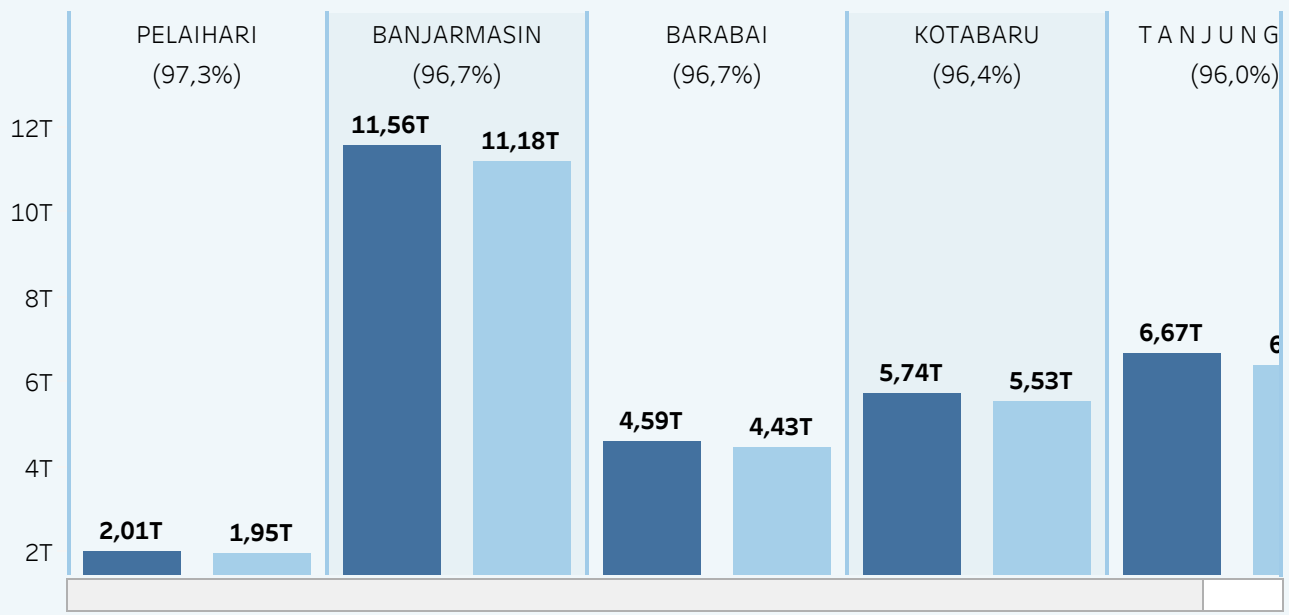
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d 5 Desember 2025

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp12,32 triliun (55,86%) dari target pendapatan negara sebesar Rp22,05 triliun, terkontraksi 33,65% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 48,45% (Rp 9,86 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 314,23% (Rp816,27 miliar), serta PNBPN mencapai 114,48% (Rp1,64 triliun). Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (80,07%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d 5 Desember 2025

1. Kinerja Belanja Negara sebesar Rp37,4 triliun (90,2%) dari pagu Rp41,4 triliun, tumbuh 0,50% yoy. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 72,4% (Rp7,87 triliun) dari pagu Rp10,86 triliun, terkontraksi 7,7% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 96,5% (Rp29,50 triliun) dari pagu Rp30,55 triliun, tumbuh 2,9% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (78,95%).

2. Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp2,09 triliun, dengan realisasi mencapai 45,46% (Rp0,95 triliun). Kementerian Agama menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 104,90% (Rp1,62 triliun) dari pagu Rp1,70 triliun. Sementara, Kementerian Pertanian menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 19,28% (Rp0,28 triliun) dari pagu Rp1,45 triliun.

3. Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah, kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Kementerian Agama dengan realisasi 104,90% (Rp1,62 triliun) dari pagu Rp1,70 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah oleh Kementerian Koperasi dengan realisasi 9,45% (Rp0,0005 triliun) dari pagu Rp0,02 triliun. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional realisasi belanjanya masih 0%.

4. Kinerja KPPN, Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Barabai dengan realisasi sebesar 97,9% (Rp5,13 triliun) dari pagu Rp5,24 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 83,4% (Rp17,03 triliun) dari pagu Rp20,42 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Implementasi kebijakan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 badan bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melunasi kewajibannya dan membantu pemerintah

dalam mengamankan penerimaan negara secara stabil dan berkelanjutan sepanjang tahun. Kebijakan ini juga memudahkan pemerintah untuk membuat proyeksi penerimaan pajak tahunan yang lebih akurat berdasarkan angsuran bulanan yang masuk.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

DJP perlu memperkuat sistem monitoring berbasis data real-time, meningkatkan koordinasi antara fungsi pengawasan dan pelayanan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kepatuhan dan akurasi perhitungan angsuran Wajib Pajak. Pengawasan yang efektif juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas data sehingga proyeksi penerimaan pajak tahunan menjadi lebih akurat.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Implementasi pengadaan barang dan jasa melalui inaproc masih terkendala Bank mitra LKPP belum dapat menerbitkan rekening virtual Account (VA). Hal ini dialami oleh satker KPU Tabalong yang telah melakukan purchase Order (PO) dan telah terbit Invoice, namun tidak dapat terselesaikan dikarenakan terkendala permasalahan pembayaran melalui VA tersebut.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Satker perlu menyampaikan kendala tersebut kepada Call Center Layanan Konsultasi LKPP agar segera ditindaklanjuti, dan LKPP perlu memperkuat kerja sama teknis dengan bank mitra untuk memastikan kesiapan sistem, serta menyediakan early warning dan panduan mitigasi bagi satker lain agar permasalahan serupa tidak terulang.

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

A | FLPP, Terdapat peningkatan unit yang dibangun periode sebelumnya 10.413 menjadi 10.699 unit, Peningkatan realisasi FLPP periode sebelumnya 9.471 unit menjadi 9.821 unit, peningkatan jumlah lokasi periode sebelumnya 664 lokasi menjadi 676, jumlah Kab./Kota yang ada program FLPP 13 Kab./Kota, dan nominal FLPP mengalami kenaikan periode sebelumnya sebesar Rp1.237.149.832.115,- menjadi Rp1.283.049.882.740,-.

B | Giant Sea Wall, di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

C | Koperasi Desa Merah Putih, Progres realisasi anggaran masih belum terdapat realisasi dari alokasi pagu/perkiraan alokasi dana sebesar Rp6.039 M.

Progres Fase I

Jumlah desa dan kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih dan jumlah koperasi desa dan kelurahan yang sudah berbadan hukum adalah sudah maksimal seperti periode berikutnya yaitu sebanyak 2.013.

Progres Fase II

1. Jumlah koperasi yang sudah memiliki akunsimkopdes(microsite) sebanyak 2.013.
2. Jumlah koperasi yang sudah memiliki gerai (minimal 1 gerai) mengalami kenaikan periode sebelumnya 606 menjadi 679.
3. Jumlah keseluruhan gerai koperasi yang sudah aktif semula 684 menjadi 770.
4. Jumlah koperasi melakukan permohonan proposal bisnis tetap 116.
5. Jumlah permohonan proposal bisnis tetap 369.

Kanwil DJPb Kalsel bersama Batii Kemenkeu dan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan money check secara onsite ke KKMP Basirih pada tanggal 1 Desember 2025.

D | Sekolah Rakyat, Realisasi Jumlah Sekolah Rakyat yang sudah berjalan tetap seperti periode sebelumnya sebanyak 3 SR. Saat ini, target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR.

Kanwil DJPb Kalsel bersama Batii Kemenkeu dan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan money check secara onsite ke SR Rintisan di BBPPKS Banjarmasin di Banjarbaru pada tanggal 1 Desember 2025.

E | Revitalisasi Sekolah, Jumlah target revitalisasi sekolah di provinsi Kalimantan Selatan adalah 301 sekolah dan seluruhnya telah dikontrakkan, yang terdiri dari Kementerian PU sebagai penanggungjawab 46 madrasah, Kementerian Dikdasmen sebagai penanggungjawab 237 sekolah, Kementerian Transmigrasi sebagai penanggungjawab 18 sekolah.

Progres target 46 madrasah, Kementerian PU menargetkan 14 madrasah selesai tahun ini dan sisanya 32 madrasah ditargetkan selesai tahun depan melalui skema multy years contract (MYC).

Progres target 18 sekolah, Kementerian Transmigrasi menargetkan seluruhnya selesai tahun ini.

Progres target 237 sekolah, Kementerian Dikdasmen menargetkan seluruhnya selesai tahun ini.

Update data diperoleh web dari Ditjen PDM dan Ditjen Vokasi PKPLK Kementerian Dikdasmen.

F | SMA Unggul Garuda, Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Telah dilakukan peresmian SMA Garuda Transformasi pada SMAN Banua, oleh Menteri Ekonomi Kreatif pada tanggal 8 Oktober 2025. Peresmian SMA Garuda di Kalsel ini merupakan bagian dari peluncuran serentak di 16 Sekolah Se-Indonesia yang terdiri dari 4 sekolah baru dan 12 sekolah transformasi.

G | Ketahanan Pangan, Terdapat kenaikan realisasi anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan semula Rp635,59 M (34,25%) menjadi Rp647,41,59 M (35,01%) dari pagu sebesar Rp1,85 T.

H | Ketahanan Energi, Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Isu FLPP, meliputi:

Pemda masih berfokus dalam program pengadaan perumahan untuk rehabilitasi rumah dampak bencana dan perumahan masyarakat di wilayah kumuh, sehingga belum maksimal untuk mendukung program FLPP bagi MBR.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Pemda perlu mendorong integrasi program melalui penyusunan peta kebutuhan perumahan yang komprehensif, penguatan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan stakeholder pembiayaan perumahan, serta pengalokasian dukungan fiskal dan regulasi yang lebih proporsional bagi percepatan realisasi FLPP.

C | Isu Giant Sea Wall, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall

D | Rekomendasi Giant Sea Wall, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall

E | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

KDMP merasa kesulitan pembiayaan dengan alternatif fasilitas pembiayaan yang tersedia yaitu:

1. Keberatan pembiayaan LPDB yang mempersyaratkan agunan sertifikat, sementara KDMP sendiri belum memiliki sertifikat aset.

2. Keberatan pembiayaan dari Himbara dengan bunga 6% setara dengan bunga KUR, walaupun tanpa mempersyaratkan agunan.

F | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

Pemerintah pusat agar memberikan insentif kepada pihak yang dapat memberikan pembiayaan kepada KDMP, sehingga KDMP memperoleh pembiayaan dan dapat segera beroperasi.

G | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Pemda merasa keberatan dengan persyaratan penyediaan lahan untuk pembangunan SR dengan syarat luas 5 Ha dan bersertifikat.

H | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Diperlukan fleksibilitas kebijakan melalui opsi penyesuaian standar luas lahan berdasarkan ketersediaan di daerah, pemanfaatan aset pemerintah yang sudah bersertifikat, serta skema kerja sama lintas sektor dengan BPN, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian ATR untuk percepatan sertifikasi.

I | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Jangka waktu pelaksanaan revitalisasi yang harus diselesaikan pada tahun 2025 untuk pekerjaan konstruksi terlalu pendek dimana anggaran dari Kementerian Dikdasmen baru disalurkan pada Juli 2025, namun realitanya dana tersedia di rekening sekolah pada bulan Agustus 2025. Sehingga berpotensi tidak terselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang ditargetkan.

J | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Pemda dan sekolah perlu memperkuat koordinasi dengan kementerian untuk mendorong percepatan proses administrasi penyaluran dana serta memastikan tidak ada hambatan teknis dalam penggunaan anggaran.

K | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melahirkan generasi muda unggul yang '*Go Internasional*' dan kembali ke daerah untuk membangun Kalimantan Selatan.

L | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Perlu disiapkan program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan internasional bagi peserta didik berprestasi agar mampu mengembangkan wawasan global dan kompetensi internasional. Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pembinaan dan reintegrasi bagi lulusan Sekolah Garuda agar potensi dan pengetahuan yang mereka peroleh di luar daerah maupun luar negeri dapat dikonstruksikan kembali untuk kemajuan Kalimantan Selatan.

M | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Curah hujan yang tinggi di periode akhir tahun ini menjadi tantangan dalam program cetak sawah di wilayah Kalimantan Selatan.

N | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Diperlukan penyesuaian strategi kerja melalui penjadwalan ulang tahapan konstruksi lahan, pemanfaatan jeda cuaca (weather window), serta penerapan metode kerja yang lebih adaptif terhadap

kondisi basah seperti penggunaan alat berat khusus lahan lembab.

O | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat 2 pembangkit bio energi berjenis biomassa dengan jaringan *off grid* (tidak terhubung langsung dengan jaringan umum) di Kabupaten Tabalong dengan total kapasitas 2,6 MW, yaitu: Pembangkit pertama dikelola oleh PT. Cakung Permata Nusa I (ATA) di desa Kasiau dengan kapasitas 1,1 MW; dan Pembangkit kedua dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari di desa Hayub dengan kapasitas 1,6 MW.

P | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi integrasi lokal, misalnya melalui penyediaan jaringan distribusi mini-grid atau skema off-taker lokal, agar listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri di sekitar lokasi.

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Terdapat kenaikan jumlah SPPG semula 182 menjadi 189, jumlah supplier semula 206 menjadi 228, dan penerima manfaat semula 469.615 menjadi 495.487 penerima.

Kanwil DJPb Kalsel bersama Batii Kemenkeu dan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan money check secara onsite ke SPPG Guntung Manggis I dan SMPN 14 Banjarbaru pada tanggal 1 Desember 2025.

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

Belum ada standar aplikasi untuk mencatat pertanggungjawaban belanja/pengeluaran operasional oleh SPPG.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

BGN agar segera menyediakan standar aplikasi pencatatan yang dapat digunakan oleh seluruh SPPG untuk mempertanggungjawabkan belanja/pengeluaran SPPG.